

Kartini (Tak) Korupsi



Rita Gani
Dosen Jurnalistik Ekom Unisa

SEBUAIH atakid perlika hasil belajar Anand Swan-ny, Stephen Knack, Young Lee, dan Omar Afzar (2000) mengemukakan bahwa korupsi akan berkerang apabila pemerintahan memiliki lebih banyak kursi di parlemen dan persisi-posisi senior di birokrasi pemerintahan serta lebih besar mendapat jatah di dunia kerja. Kisei yang menggunakan sejumlah data independent dan data mikro ini juga memenukkan bahwa pemerintahan lebih seketik terlibat di dalam kasus suap dan lebih sedikit yang dapat menghentikan kejadian suap. Temuan ini tentu mengindikan di monarki bila dibandingkan dengan kontesia peristawa korupsi yang silih berganti menurut topik pembahasan di hampir semua jenis media massa tanah air, dan beberapa di antaranya melibalkan per-

tempaan. Saat ini korupsi bukan saja menjadi masalah ekonomi dan politik, tetapi juga menjadi masalah budaya yang seolah-olah run-memurut tidak henti. Ada yang jurus penyelidikan, tetapi juga banyak yang tak jelaiah kabarnya. Sepanjang tahun 2017, data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP) memuat telah melakukan 114 kegiatan penyelidikan kasus korupsi, 118 penyelidikan kasus, dan 94 kegiatan penuntian perkara korupsi. Dari perkara-perkara korupsi yang ditangani PKP tersebut, ada beberapa ka-

se yang "menyeret" perempuan di dalamnya, termasuk pada kasus e-KTP dengan terdakwa Selya Novanto, baik sebagai pelaku utama, saksi, pihak-pihak yang terlibat dengan berbagai peran dalam kasus korupsi tersebut, maupun sebagai korban.

Perempuan sebagai pelaku korupsi adalah sebuah "berta sebh" dalam kisah emansipasi yang susah payah diperjuangkan KA Kartini berabad silam. Sebagai salati satu perempuan pejuang yang hidup dalam banyak batasan pada masa penjajahan dulu, bisa mendapatkan hak atas pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki adalah mimpi besar Kartini yang terwujud saat ini. Meskipun fokus utama perlawanan Kartini masa itu adalah pada bidang pendidikan, hasilnya berdampak luas pada perkembangan diri perempuan saat ini. Kita melihat bahwa sekurang-laki-laki dan perempuan cenderung punya kesempatan sama dalam berbagai aspek kehidupan, dan tetap menyenalkan diri dengan kodratnya sebagai perempuan. Tentu, kontes kesetaraan yang ada saat ini juga melingkupi berbagai sektor dan bidang pekerjaan. Perempuan menempati banyak posisi penting di ruang publik, yang belakangan ini nyatakan berbagai kasus korupsi dan seoliat "memutarbelakan" temuan kajian Anand dkk tersebut.


"Pelaka" budaya

Sebagai ibu dan pilar penting di keluarga, perempuan harusnya menjadi pilar utama yang memajukan nilai-nilai dan budaya yang baik pada anggota keluarganya, karena hal ini akan mempengaruhi kehidupannya di masyarakat. Ia harusnya bisa memberi contoh bagaimana suatu perilaku moral bisa terpelajar dengan baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Perempuan sebagai ibu harus bisa menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga tidak larut oleh perkembangan zaman. Namun, Anne Marie Goela (dalam Soebagio, 2009:760) berpandangan kesnyataan-kenyataan hidup menghidupi keluarga dan pelang mendaparkan untung dari jabatan publik akan mendorong perempuan untuk melong gaganan-gagasan ideal mengenai moral mereka, salah satunya adalah mengaja budaya untuk jujur dan tidak mengambih baik orang lain (tidak korupsi). Pernyataan ini cukup relevan dengan ritam peristawa korupsi, mengingat cukup banyak perempuan yang melakukan tindakan korupsi di negeri ini. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 2006 sampai dengan 2016, ada sekitar 46 perempuan yang melakukan tindakan korupsi. Data ini tentu berkembang dalam dua tahun terakhir, catatan KPK pada tahun 2017 ada tujuh perempuan masuk dalam daftar tersangka kasus korupsi maupun gratifikasi di KPK yang umumnya sebagai pejabat publik, dan awal tahun 2018 ada nama Ines Ayyuningsih (Bupati Sibang) yang terjerat kasus korupsi. Ini menjelaskan bahwa

bila selama ini perempuan cenderung hanya sebagai objek korban dalam sebuah kasus korupsi, maka beberapa tahun terakhir perempuan juga menjadi pelaku utama. Tentu hal ini menjadi suatu kondisi yang membuat miris terkait dengan peran perempuan sebagai ibu dalam sebuah keluarga, yang seharusnya hanya membertarkan contoh-contoh yang baik.

Kontes kesuksesan emansipasi di satu sisi memang membuat perempuan pada peralaban kehidupan lebih baik, tetapi hal ini juga menjadi sebuah tantangan besar yang harus diermati saat ini bagi para perempuan yang menduduki jabatan publik di berbagai perusahaan, instansi pemerintahan, dan lainnya. Terutama dalam hal menjaga nilai-nilai baik-memelihara dan mengembangkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pada praktiknya godaan korupsi tersebut tidak memperhatikan gender, seperti menurut peneliti University of Melbourne (2006) mengenai gender dan korupsi bahwa tidak terdapat perbedaan-perbedaan gender yang signifikan di Indonesia, India, dan Singapura (dalam Soebagio, 2009:760). Hasil riset ini menjelaskan bahwa korupsi pada hakekatnya bukanlah masalah gender tetapi adalah masalah keluasaan dan kesempatan, keluasaan membuat seseorang korup ketika kesempatan tersebut dan ketika tidak ada kegunaan moral ketika me-nyemban amarah tersebut. Meskipun data percobaan yang terlibat kasus korupsi masih sangat sedikit jumlahnya, tetapi menjadi bukti yang menatakan mitos bahwa perempuan lebih antikorupsi di-



biaya
BIVYA pilkada jadi
hisi korupsi,
-Nengon "ti siasi ti gih"
beras
HARGA beras di-
awasi,
-Jangan sampai tak
terkenal.
jauh
SIAPKAN pendidik-
an jarak jauh,
-Siapkan SDM lebih
berkualitas.
Si Hajar

bandingkan dengan laki-laki. Sebagai pelaku dalam menesruskan nilai-nilai baik di keluarga, harusnya perempuan mampu memutus mata rantai budaya korupsi ini. Sejalan dengan semangat emansipasi, mayoritas jumlah perempuan di negara ini seharusnya menjadi potensi yang berarti bagi perubahan terhadap kasus korupsi. Ini tentu untuk bisa merangkul para perempuan agar kuat aktif mencegah tindak pidana korupsi. Karena dalam banyak hal, korupsi (siapa pun pelakunya) berdampak buruk bagi perempuan daripada laki-laki. Semoga perjuangan KA Kartini dalam kontes kesetaraan gender tidak menempatkan para perempuan pada posisi yang "melawan" kodratnya sebagai perempuan, sebagai tu-